

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu perusahaan. Informasi tersebut diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti investor, pemasok, dan kreditur, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. PSAK yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan karakteristik umum diatur dalam PSAK 201. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), mendefinisikan *Fraudulent financial statement* sebagai tindakan penyajian laporan keuangan yang mengandung salah saji material secara sengaja, baik melalui penghilangan maupun pemanipulasian informasi keuangan, dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Praktik ini menyebabkan informasi yang disajikan tidak lagi mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas aliran dana investasi dan kredit yang masuk ke perusahaan, dan menjadi alat pengukur bagi para investor untuk mengambil keputusan investasi yang akan mendatang. Menurut Lindasari (2019) kecurangan dalam pelaporan keuangan mengakibatkan dampak yang substansial dan memiliki dampak negatif seperti hilangnya kepercayaan investor, rusaknya reputasi perusahaan, potensi.

Dalam penelitian Nurul & Fitria (2023) mengemukakan bahwa setiap manajemen perusahaan cenderung berupaya menyajikan kondisi keuntungan perusahaan dalam bentuk yang paling menguntungkan. Namun, pada beberapa kesempatan, perusahaan menampilkan laporan kinerjanya yang tidak sesuai dengan realitas. Kondisi ini dipengaruhi oleh dorongan perusahaan untuk membentuk citra positif di mata berbagai pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendorong

manajemen melakukan penyesuaian atau manipulasi pada pos-pos tertentu dalam laporan keuangan sebelum dipublikasikan. Kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham kepada manajemen dalam mengelola dana investasi perusahaan pada situasi tertentu dapat memicu munculnya perilaku oportunistik, di mana manajemen cenderung menggunakan praktik yang kurang tepat untuk menampilkan kinerja seolah-olah telah mencapai hasil yang optimal.. Kadang-kadang, hubungan antara pemegang saham dan manajemen mengalami ketidakcocokan, sehingga menimbulkan konflik karena manajemen kurang mempertimbangkan kepentingan pemegang saham.

Ulfah, et al (2017) mengemukakan bahwa praktik kecurangan pada dasarnya akan terus berulang apabila tidak disertai dengan mekanisme pencegahan dan pendeteksian yang memadai. Oleh karena itu, kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan perlu memperoleh perhatian serius agar dapat dikenali dan diminimalkan. Upaya tersebut penting dilakukan guna menjaga kredibilitas laporan keuangan sehingga tetap dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan maupun masyarakat secara luas. Sejalan dengan hal tersebut, Tessa dan Harto (2016) menegaskan bahwa *fraudulent financial statement* merupakan permasalahan yang bersifat serius dan tidak dapat diabaikan. Fakta bahwa kasus fraud terus ditemukan dari tahun ke tahun menunjukkan pentingnya peran auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan sejak dini, sehingga potensi terjadinya fraud dan dampak skandal yang berkepanjangan dapat dicegah.

Zimbelman (2012) dalam bukunya *Forensic Accounting* menjelaskan bahwa kecurangan merupakan konsep yang bersifat luas dan mencakup berbagai metode atau strategi yang dilakukan secara sengaja oleh individu dengan kemampuan dan kecerdasan tertentu. Kecurangan mencakup segala tindakan yang dirancang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan pihak lain. Dalam konteks ini, kecurangan melibatkan unsur penipuan yang memanfaatkan kepercayaan atau keterbatasan pengetahuan pihak lain, sehingga pelaku dapat memperoleh keuntungan finansial maupun nonfinansial tanpa memberikan nilai yang sepadan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kecurangan bukanlah

tindakan spontan, melainkan hasil dari perencanaan yang sistematis dan sering kali bertentangan dengan norma etika maupun ketentuan hukum. Sementara itu, Natilia dan Kuang (2023) mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dilakukan baik oleh individu di dalam maupun di luar organisasi. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Definisi ini menekankan bahwa fraud merupakan tindakan yang disengaja dan memiliki konsekuensi merugikan bagi berbagai pihak yang terlibat.

Seiring berjalannya waktu, *fraud triangle theory* yang pertama kali dikemukakan oleh Cressey mengalami perkembangan dan penyempurnaan sejalan dengan dinamika praktik serta penelitian di bidang kecurangan. Pengembangan awal terhadap *fraud triangle theory* dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 melalui pengenalan *fraud diamond theory*, yang menambahkan satu dimensi kualitatif berupa kemampuan (*capability*) sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan. Selanjutnya, pada tahun 2011, Crowe melakukan pengembangan lanjutan atas teori kecurangan yang sebelumnya diperkenalkan oleh Cressey. Hasil kajian Crowe menunjukkan bahwa unsur kesombongan (*arrogance*) turut berperan signifikan dalam mendorong perilaku kecurangan. Dalam model yang dikembangkannya, Crowe mengintegrasikan konsep *fraud triangle* dengan elemen kompetensi (*competence*), sehingga terbentuk kerangka kecurangan yang terdiri atas lima faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan kesombongan (*arrogance*). Model tersebut kemudian dikenal sebagai *Crowe's Fraud Pentagon Theory* yang diperkenalkan pada tahun 2011.

Kasus kecurangan di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations* yang dirilis oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2022, dengan total 23 kasus dan nilai kerugian terbesar mencapai Rp242,26 miliar (Patnistik, 2023). Jenis

fraud yang paling dominan adalah korupsi dengan proporsi sebesar 64 persen, diikuti oleh penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9 persen, serta kecurangan laporan keuangan sebesar 6,7 persen.

Meskipun secara persentase kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan tergolong lebih rendah dibandingkan jenis *fraud* lainnya, dampak kerugian yang ditimbulkan relatif besar. Nilai kerugian rata-rata akibat *fraudulent financial statements* dilaporkan melebihi sepuluh miliar rupiah per kasus, sehingga menjadikan jenis kecurangan ini sebagai salah satu bentuk *fraud* yang paling merugikan. Hal ini sejalan dengan temuan Survei *fraud* di Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, yang mencatat total kerugian akibat *fraud* mencapai Rp873,43 juta, dengan rata-rata kerugian per kasus berada di atas Rp7 juta. Selain itu, sekitar 38,5 persen kasus *fraud* yang teridentifikasi melibatkan nilai kerugian lebih dari Rp1 juta.

Tingginya dampak kerugian akibat kecurangan, khususnya dalam laporan keuangan, menjadikan *fraud* sebagai isu yang sangat krusial di Indonesia. Praktik kecurangan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan serta menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, entitas bisnis dan lembaga keuangan dituntut untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* sejak dini. Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan untuk meminimalkan praktik kecurangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan andal, sehingga penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik serta meningkatkan akuntabilitas dan integritas laporan keuangan.

Fenomena terkait *fraudulent financial statement* seperti PT Waskita Karya (WSKT) dan PT Wijaya Karya (WIK) telah mengemuka dan mengindikasikan

adanya penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini terungkap melalui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh kedua perusahaan tersebut tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Meskipun tercatat seolah-olah laba bertahun-tahun, padahal *cash flow* nya tidak pernah positif. Namun, pihak Waskita Karya membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa laporan keuangan mereka telah disusun sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulasi pasar modal yang berlaku. Saat ini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh kedua perusahaan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan aktual. Meskipun secara akuntansi perusahaan tampak memperoleh laba selama beberapa tahun berturut-turut, *cash flow* mereka justru menunjukkan kondisi negatif yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan praktik rekayasa laporan keuangan atau penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi riil perusahaan. Pihak Waskita Karya membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh laporan keuangan telah disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Meski demikian, Kementerian BUMN bersama BPKP masih terus melakukan proses audit investigatif untuk memastikan kebenaran laporan keuangan yang disajikan oleh kedua perusahaan tersebut

Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdiri sejak tahun 1961 dan dikenal sebagai perusahaan yang berperan penting dalam proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan gedung pemerintah. Sejak melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada tahun 2012 dengan kode saham *WSKT*, perusahaan ini mencatat pertumbuhan aset yang signifikan. Hingga Agustus 2023, total aset Waskita tercatat sebesar Rp104,4 triliun, dengan pendapatan konsolidasi tahun 2022 mencapai Rp34,6 triliun. Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau *WIKA*, yang berdiri pada tahun 1960, juga merupakan salah satu BUMN di

sektor konstruksi dengan aktivitas bisnis yang meliputi pembangunan infrastruktur, energi, dan properti. Perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 dengan kode saham *WIKA*. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, WIKI membukukan total aset sebesar Rp87,6 triliun dan pendapatan konsolidasi sebesar Rp31,4 triliun. Waskita Karya maupun Wijaya Karya merupakan dua entitas penting dalam pembangunan nasional, namun kasus dugaan rekayasa laporan keuangan yang menimpa keduanya menunjukkan adanya potensi kegagalan pengawasan (*Ineffective monitoring*) serta *financial distress* yang dapat mendorong munculnya tindakan *fraudulent financial statement*. Fenomena ini menjadi bukti empiris penting bahwa *fraudulent financial statement* tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga dapat muncul pada perusahaan milik negara yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional Amalia et al. (2025).

Pada tahun 2024 kembali terungkap dugaan praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan yang melibatkan dua perusahaan konstruksi milik negara, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan opini yang diterbitkan oleh Tempo pada tanggal 19 Mei 2024, menyatakan adanya indikasi kecurangan tersebut mulai muncul ketika pihak perbankan menemukan adanya ketidaksesuaian data tagihan selama proses restrukturisasi kredit kedua Perusahaan tersebut. Modus yang digunakan oleh Waskita dan Wijaya Karya tergolong sederhana, yaitu dengan tidak mencatatkan sejumlah utang yang telah menunggak sejak tahun 2020. Penghilangan sebagian kewajiban tersebut menyebabkan total utang dalam laporan keuangan terlihat lebih kecil daripada kondisi sebenarnya. Akibatnya, laporan keuangan menampilkan citra stabilitas keuangan yang semu, seolah-olah perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat, padahal secara faktual sedang mengalami tekanan keuangan yang cukup berat. Sebagai ilustrasi, PT Wijaya Karya tercatat memperoleh laba bersih sebesar Rp322 miliar pada tahun 2020, namun jumlah tersebut menurun menjadi Rp214 miliar pada tahun 2021, dan kembali anjlok menjadi hanya Rp12,5 miliar pada tahun 2022. Sementara itu, PT Waskita Karya memang masih membukukan kerugian, namun nilainya menurun dari Rp9,28 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,67 triliun pada tahun 2022. Meskipun secara nominal menunjukkan perbaikan

kinerja, tren ini justru menimbulkan indikasi bahwa pelaporan laba dan rugi tidak sepenuhnya mencerminkan realitas keuangan perusahaan.

Ketidaksesuaian antara data akuntansi dan kondisi keuangan aktual tersebut menjadi sinyal kuat adanya kemungkinan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Jika praktik seperti ini benar terjadi, hal itu dapat menimbulkan distorsi informasi keuangan, mengancam integritas pelaporan akuntansi, dan berpotensi mengurangi kepercayaan investor terhadap perusahaan publik, terutama pada sektor BUMN yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional, Amalia et al. (2025). Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya pengawasan atau tekanan manajemen, tetapi juga dapat muncul akibat *financial distress* yang memicu manajemen untuk melakukan rekayasa terhadap data keuangan guna menjaga citra stabilitas di mata pemangku kepentingan.

Septriani & Handayani (2018) menyatakan teori kecurangan (*fraud*) secara luas menjelaskan motivasi dan alasan di balik perilaku manajemen yang terlibat dalam praktik kecurangan pada laporan keuangan. *Pressure* yang dihadapi manajemen sebagai pihak agen bagi investor selaku prinsipal, seperti tuntutan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau menjaga nilai perusahaan di pasar modal, kerap menjadi justifikasi bagi manajemen dalam melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Hal ini diperburuk jika terdapat *opportunity* untuk melakukan kecurangan dengan risiko deteksi yang rendah. Peluang tersebut berperan sebagai pintu masuk bagi praktik kecurangan, sementara tekanan dan pembenaran mendorong manajemen untuk melakukannya. Namun, kecurangan yang melibatkan teknik rumit dan nilai besar tidak akan mungkin terjadi tanpa kehadiran individu dengan kemampuan khusus di dalam perusahaan. Dengan kata lain, pelaku kecurangan harus memiliki kapabilitas (*capability*) atau kompetensi (*competence*) untuk menipu sistem pengendalian internal, mengontrol situasi, dan merancang strategi untuk menutupi tindakan mereka. Perasaan superioritas dan kesombongan (*arrogance*) yang timbul dari posisi mereka membuat pelaku yakin bahwa aturan pengendalian internal tidak berlaku bagi mereka.

Kondisi eksternal perusahaan juga dapat mempengaruhi kecenderungan dilakukannya *fraud*, salah satunya adalah *financial distress*. Ketika perusahaan berada dalam tekanan finansial, manajemen cenderung mencari cara untuk mempertahankan citra perusahaan, termasuk melalui manipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, *financial distress* dapat berperan sebagai pemicu tambahan yang memperbesar pengaruh *fraud risk factors* terhadap laporan keuangan. Jenis kecurangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) yang dianalisis menggunakan pendekatan *Fraud Pentagon Theory*. Teori ini merupakan bentuk pengembangan dan penyempurnaan dari model analisis kecurangan sebelumnya, yaitu *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Menurut Priantara dalam Ulfah et al. (2017), *fraudulent financial statement* didefinisikan sebagai tindakan penyajian yang keliru (*misstatement*) secara sengaja atau penghilangan (*omission*) atas angka maupun pengungkapan tertentu dalam laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian ini, tingkat kecenderungan terjadinya *fraudulent financial statement* diproksikan menggunakan model *Beneish M-Score* sebagai alat pendeteksian indikasi manipulasi laporan keuangan.

Beneish M-Score dipilih sebagai indikator pengukur kecurangan laporan keuangan karena model ini telah banyak di-uji secara empiris dan terbukti mampu mendeteksi manipulasi laba melalui rasio-rasio keuangan yang mencerminkan unsur-unsur “*red flag*” kecurangan, seperti pertumbuhan piutang vs penjualan, kualitas aset, margin kotor, serta akrual total terhadap aset. Misalnya, hasil penelitian yang dilakukan Rachmi et al, (2020) pada perusahaan pertambangan di BEI menunjukkan bahwa beberapa komponen *M-Score* seperti DSRI, GMI, SGI, dan TATA memiliki kemampuan diskriminatif yang signifikan untuk membedakan laporan yang dicurigai dimanipulasi dan yang tidak. Relevansi penggunaan model *Beneish M-Score* dalam penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan kasus yang menimpa PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dua perusahaan konstruksi milik negara yang sempat diduga melakukan penyimpangan dalam penyajian laporan keuangannya. Dugaan tersebut muncul setelah hasil pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) serta Kementerian BUMN menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data laporan keuangan dan kondisi riil perusahaan. Salah satu indikasi yang ditemukan adalah praktik tidak dicatatkannya sebagian utang yang telah jatuh tempo sejak tahun 2020, sehingga posisi keuangan terlihat lebih stabil dibandingkan kenyataan sesungguhnya. Dalam situasi seperti ini, model *Beneish M-Score* dapat digunakan sebagai alat analisis empiris untuk menilai apakah perusahaan berpotensi melakukan *earnings manipulation* melalui perubahan signifikan dalam rasio keuangannya. Penggunaan *Beneish M-Score* juga memberikan nilai tambah karena mampu mengungkapkan pola manipulatif yang terselubung di balik angka-angka akuntansi, seperti inflasi penjualan, penurunan kualitas aset, serta pergeseran struktur biaya. Oleh karena itu, pemilihan *Beneish M-Score* sebagai indikator pengukur *fraudulent financial statement* dinilai tepat untuk menganalisis potensi penyimpangan laporan keuangan di antara perusahaan publik, khususnya pada sektor konstruksi yang memiliki tingkat kompleksitas proyek dan risiko pembiayaan yang tinggi.

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pendorong yang dapat memicu seseorang melakukan kecurangan. Tekanan tersebut dapat bersumber dari individu, misalnya beban ekonomi keluarga atau tuntutan untuk mempertahankan gaya hidup konsumtif. Selain itu, tekanan juga dapat berasal dari lingkungan eksternal, seperti desakan pihak manajemen puncak untuk merekayasa laporan keuangan, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan yang sulit dihindari. Menurut Tuanakota dalam Siddiq et al (2017) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan penipuan dan penggelapan uang perusahaan karena adanya tekanan yang menghimpitnya, tekanan itu dapat berupa adanya kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan.

Pressure dalam penelitian ini diukur dengan *Financial stability* karena dianggap merefleksikan sejauh mana kondisi keuangan perusahaan dapat bertahan secara konsisten dari waktu ke waktu. Ketika stabilitas keuangan menurun, manajemen sering kali berupaya menjaga persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan dengan memanipulasi pendapatan atau laba agar tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Indikator ACHANGE (*Change in Total Assets*) mengukur perubahan total aset perusahaan antarperiode, yang dapat mencerminkan

pertumbuhan atau penurunan aktivitas bisnis, Skousen et al (2009). Perubahan signifikan pada aset, terutama penurunan yang tajam, dapat menimbulkan tekanan terhadap manajemen untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan. Semakin tinggi pertumbuhan aset, maka semakin stabil kondisi keuangan perusahaan sehingga tekanan untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan semakin rendah. Sebaliknya, pertumbuhan aset yang rendah menunjukkan tekanan keuangan yang tinggi yang dapat mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, *financial stability* yang menurun sering diasosiasikan dengan peningkatan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Menurut *Fraud Triangle*, tekanan untuk mempertahankan stabilitas keuangan dapat menjadi alasan manajemen memanipulasi laporan keuangan agar terlihat stabil. Perubahan signifikan pada total aset dapat memunculkan insentif untuk melakukan pelaporan yang menyesatkan Skousen et al. (2009). Hasil penelitian dari Wilantari & Ariyanto (2023) menyatakan bahwa *Financial stability* berpengaruh signifikan. Hasil tersebut sama dengan Lestari & Henny (2019) Annisya et al., (2016), Aprilia (2017), Septriani & Handayani (2018). Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani et al (2022), Nurhasanah et al (2022), Nurul & Fitria (2023), Putri & Sasongko (2024), Indriyani (2020) yang menyatakan bahwa *Financial stability* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Opportunity merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan, yang timbul akibat lemahnya mekanisme pengawasan dalam lingkungan internal perusahaan serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Rendahnya tingkat pengendalian dan pengawasan tersebut membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi tanpa mudah terdeteksi. Dalam penelitian ini, *opportunity* diproksikan melalui *Ineffective monitory* menggunakan indikator BDOUT yang mengacu pada lemahnya fungsi pengawasan internal, khususnya dari dewan komisaris independen, dalam memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. BDOUT menggambarkan proporsi komisaris independen dalam struktur dewan. Menurut teori agensi, semakin rendah proporsi dewan independen, semakin

lemah pengawasan terhadap kebijakan keuangan dan pelaporan (Beasley, 1996). Ketidakefektifan fungsi pengawasan dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi. Dengan demikian, *ineffective monitoring* merupakan salah satu faktor risiko penting kemungkinan dilakukannya praktik *fraudulent financial statement*. Luhri et al (2021) mengemukakan bahwasannya *ineffectivite monitoring* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Junardi (2017) didukung Setiawati & Baningrum (2018) yang menyatakan *ineffectivite monitoring* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun berbeda dengan Lestari & Henny (2019) Nurhasanah et al (2022), Septriani & Handayani (2018), Wilantari & Ariyanto (2023) yang menyatakan bahwa *Ineffectivite Monitoring* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Rationalization merupakan bentuk pembenaran yang muncul dalam pemikiran pelaku setelah tindakan kecurangan dilakukan. Pola pikir ini berkembang karena pelaku berupaya mencegah terungkapnya perbuatan yang telah dilakukan, sehingga manipulasi yang terjadi dianggap sebagai tindakan yang dapat dibenarkan. Proses rasionalisasi tersebut didorong oleh keinginan pelaku untuk tetap berada dalam kondisi aman serta terhindar dari sanksi hukum, yang mencerminkan sikap penghindaran risiko (*risk averse*) guna menghindari konsekuensi hukum atas tindakan kecurangan yang dilakukan Aprilia (2017). Pelaku kecurangan sering kali meyakini bahwa tindakan mereka bukanlah suatu bentuk penipuan, melainkan hak yang sah, dan pada beberapa kesempatan, mereka merasa telah memberikan kontribusi signifikan kepada organisasi. Dalam penelitian ini, *rationalization* diukur dengan *Changes in auditor*. Perubahan auditor eksternal dapat menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian antara auditor dan manajemen, terutama terkait temuan audit atau opini atas kewajaran laporan keuangan. Variabel ini biasanya diukur menggunakan dummy variable, di mana nilai 1 menunjukkan adanya pergantian auditor dan 0 menunjukkan tidak ada pergantian Lou(2009). Pergantian auditor yang terjadi secara tidak wajar misalnya sesaat sebelum laporan keuangan diterbitkan sering dihubungkan dengan upaya manajemen untuk

menghindari deteksi atas praktik manipulasi. Oleh karena itu, *change in auditor* dapat mencerminkan risiko meningkatnya praktik kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Luhri et al, (2021), *changes in auditor* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Andriani et al (2022), Lestari & Henny (2019), Nurhasanah et al (2022), Setiawati & Baningrum (2018) dan Junardi (2017). Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Laming et al (2019), Putri & Sasongko (2024) Septriani & Handayani (2018) yang menyatakan bahwa *changes in auditor* berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*.

Kompetensi (*capability*) menggambarkan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kelemahan sistem dan melaksanakan kecurangan secara efektif. Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa tidak semua individu mempunyai kemampuan untuk melakukan kecurangan, karena dibutuhkan pengetahuan, posisi strategis, dan pemahaman mendalam terhadap sistem perusahaan. Menurut Crowe (2011), kompetensi berkaitan dengan kapasitas pelaku dalam mengenali peluang, memahami cara menyembunyikan jejak kecurangan, serta mengelola risiko agar tindakannya tidak terdeteksi. Dalam penelitian empiris, variabel ini sering diukur dengan *change in director*, karena perubahan pimpinan dapat mencerminkan pergeseran kemampuan manajerial dan strategi yang membuka potensi manipulasi baru. Menurut Luhri et al (2021) *change of director* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pernyataan tersebut didukung oleh Putri & Sasongko (2024) , Andriani et al (2022), Siddiq & Agus (2019) dan Aprilia,(2017). Namun berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Nadziliyah & Primasari (2022) Preicilia et al (2022), Laming et al (2019) , Siddiq et al (2017) yang menyatakan bahwa *change of director* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Arogansi (*arrogance*) adalah keyakinan berlebihan seseorang terhadap posisi atau kekuasaannya sehingga merasa kebal terhadap peraturan dan pengawasan. Faktor ini merupakan tambahan dalam teori Fraud Pentagon yang membedakannya dari teori Fraud Diamond. Menurut Crowe (2011), individu yang

memiliki sifat arogan cenderung merasa lebih unggul dan menganggap dirinya tidak akan tertangkap saat melakukan kecurangan. Dalam konteks perusahaan, arogansi sering tercermin dari perilaku eksekutif yang terlalu menonjolkan diri dalam publikasi perusahaan. Penelitian Septriani & Handayani (2018a) menggunakan *frequent number of CEO picture* dalam laporan tahunan sebagai proksi arogansi menyatakan bahwa semakin sering CEO muncul dalam laporan atau media internal perusahaan, semakin tinggi indikasi adanya sifat narsistik yang dapat meningkatkan kecenderungan melakukan *fraudulent financial statement* untuk mempertahankan citra pribadi maupun reputasi organisasi. Hasil tersebut sejalan dengan hasil, Siddiq et al (2017), Laming et al (2019), Putra et al (2024) yang menyatakan bahwa *ceo's picture* berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial statement*. Namun hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Henny (2019), Nadziliyah & Primasari (2022), Aprilia (2017) dan Adi et al (2018) yang menyatakan *ceo's picture* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Financial Distress adalah kejadian yang dialami oleh suatu perusahaan terjadi ketika perusahaan gagal memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyek arus kas menunjukkan perusahaan sedang mengalami penurunan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan berujung pada kebangkrutan. Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan akan menjadi faktor pendorong bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan atau bahkan memanipulasi laporan keuangan. Manajemen yang memanipulasi laporan keuangan dalam keadaan kesulitan keuangan akan berusaha menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya dengan memanipulasi akun pendapatan, beban, dan kewajiban, Utami & Pusparini (2019). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul & Fitria (2023) menyatakan bahwa *Financial Distress* secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan Utami & Pusparini (2019), Mukhtaruddin et al (2022), Fatah & Hakim (2024) dan Hutaeruk et al (2021). Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al (2025) dan Lastrini & Suartana

(2023) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

Dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan, pendekatan *Fraud Pentagon Theory* diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif melalui lima elemen utama, salah satunya adalah *pressure* atau tekanan. Tekanan dapat timbul dari berbagai kondisi seperti stabilitas keuangan, tekanan keuangan, tuntutan target kinerja, maupun tekanan dari pemangku kepentingan eksternal. Kondisi ini sering kali mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan guna mempertahankan citra positif perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan merespons tekanan keuangan dengan cara yang sama. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi bagaimana tekanan berdampak terhadap potensi terjadinya kecurangan adalah ukuran perusahaan (*firm size*). Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya finansial dan operasional yang lebih memadai, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, serta pengawasan dari pihak eksternal yang lebih intensif seperti auditor, investor institusional, dan regulator, Junus et al (2025). Dengan demikian, perusahaan besar cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mengelola tekanan tanpa harus melakukan tindakan curang. Sebaliknya, perusahaan kecil sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses pendanaan, rentan terhadap tekanan pasar, serta memiliki sistem pengawasan internal yang kurang memadai. Kwamboka et al (2025) Dalam situasi tekanan yang tinggi, kondisi ini dapat meningkatkan kemungkinan manajemen mengambil keputusan yang tidak etis, termasuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan berpotensi menjadi variabel yang memoderasi pengaruh *pressure* terhadap *fraud*, yakni memperlemah atau memperkuat hubungan tersebut tergantung pada besar kecilnya perusahaan.

Penggunaan *firm size* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Herdasaldy & Wijoyo, 2025) pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di BEI menunjukkan hasil bahwa *firm size* mampu memperlemah pengaruh *Financial Stabiltiy* terhadap *fraudulent financial statement*. Dengan pertimbangan ini, Ukuran

perusahaan (*firm size*) diposisikan sebagai variabel moderasi yang dihipotesiskan dapat mempengaruhi kekuatan hubungan antara *Financial Stability* terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya, ketika elemen fraud seperti *opportunity* atau *capability* menunjukkan kecenderungan meningkatkan risiko fraud. Dengan demikian, pengujian terhadap peran moderasi *firm size* dalam penelitian ini menjadi penting, baik secara teoritis untuk memperkaya model prediksi fraud, maupun secara praktis sebagai masukan bagi regulator dan entitas korporasi dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan internal Herdasaldy & Wijoyo (2025).

Penelitian terdahulu mengenai *Fraud Pentagon* yang dilakukan oleh Lestari dan Henny (2019) menunjukkan bahwa terdapat dua elemen Fraud Pentagon yang berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial statement*, yaitu *financial stability* sebagai proksi tekanan (*pressure*) dan *Ineffective monitory* sebagai proksi peluang (*opportunity*) pada perusahaan sektor perbankan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi stabilitas keuangan dan lemahnya pengawasan internal berperan penting dalam mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan. Namun demikian, temuan tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luhri et al. (2021) pada perusahaan sektor properti dan real estat. Studi tersebut menunjukkan bahwa *financial stability* dan *ineffective monitory* tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*. Perbedaan hasil penelitian mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri, periode penelitian, maupun pendekatan pengukuran variabel. Adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *fraudulent financial statement*, guna memperoleh bukti empiris yang lebih konsisten dan komprehensif. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan studi-studi sebelumnya, yaitu dengan menambahkan *firm size* sebagai variabel moderasi serta pengukuran variabel dependen menggunakan *Beneish M-Score*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menetapkan *fraudulent financial statement* sebagai variabel dependen. Sementara itu, *financial distress*, *financial stability*, *Ineffective monitory*, *changes*

in auditor, changes of director, dan CEO's pictures digunakan sebagai variabel independen, dengan *firm size* berperan sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan yang berkualitas seharusnya menyajikan informasi yang akurat dan andal mengenai posisi keuangan serta kinerja perusahaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti manajemen, karyawan, investor, kreditor, pemasok, pelanggan, maupun pemerintah dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang stabil. Ketika menghadapi tekanan finansial, manajemen kerap terdorong untuk melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan guna membangun persepsi kinerja yang positif, dengan tujuan mempertahankan kepercayaan investor serta menghindari reaksi negatif dari pasar. Manipulasi tersebut umumnya dilakukan melalui penyesuaian atau pengubahan pada pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Di sisi lain, investor mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasi utama dalam menentukan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan telah dimanipulasi, maka keputusan yang diambil berpotensi keliru dan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai pihak penyusun laporan keuangan dan para pengguna informasi inilah yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya *fraudulent financial statement*.

Kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak hanya merusak kredibilitas perusahaan dan integritas profesi akuntansi, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kepercayaan publik dan stabilitas perekonomian. Dalam konteks ini, auditor memiliki peran strategis sebagai pihak independen yang bertugas mendeteksi serta mencegah potensi manipulasi laporan keuangan sejak dini. Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya praktik kecurangan yang tidak hanya dipicu oleh lemahnya sistem pengendalian internal, tetapi juga oleh tekanan keuangan serta faktor perilaku manajemen yang memengaruhi proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik beberapa pertanyaan dalam penelitian ini , sebagai berikut:

- 1) Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*?
- 2) Apakah *financial stability* berpengaruh negatif terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*?
- 3) Apakah *ineffective monitory* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*?
- 4) Apakah *changes in auditor* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*?
- 5) Apakah *changes of director* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*?
- 6) Apakah *CEO's pictures* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*?
- 7) Apakah *firm size* mampu memoderasi hubungan antara *financial stability* dan pendeteksian *fraudulent financial statement*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai indikator-indikator kecurangan yang terdapat dalam *Crowe's Fraud Pentagon Theory*. Selain itu, penelitian ini berupaya menginvestigasi serta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana *Crowe's Fraud Pentagon Theory* dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam mendeteksi kecenderungan terjadinya *fraudulent financial statement*. Adapun tujuan penelitian ini dirinci sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *financial stability* terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*.

- 3) Untuk menganalisis pengaruh *ineffective monitoring* terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh *changes in auditor* terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh *changes of director* terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*.
- 6) Untuk menganalisis pengaruh *CEO's pictures* terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*.
- 7) Untuk menganalisis peran *firm size* dalam memoderasi pengaruh *financial stability* terhadap pendeteksian *fraudulent financial statement*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi keuangan dan auditing, khususnya yang berkaitan dengan teori *Fraud Pentagon* dan deteksi *fraudulent financial statement*. Dengan menambahkan variabel moderasi *firm size* pada hubungan antara *pressure* dan kecurangan laporan keuangan, penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana karakteristik perusahaan dapat memengaruhi tingkat tekanan yang dirasakan manajemen dalam menghadapi tuntutan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat atau memperluas temuan sebelumnya terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan, serta mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara tekanan keuangan dan kecurangan laporan keuangan, khususnya pada sektor infrastruktur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan guna meminimalkan risiko kecurangan laporan keuangan. Bagi pihak manajemen, pemahaman mengenai pengaruh tekanan

keuangan dan karakteristik perusahaan diharapkan dapat mendorong pengelolaan kinerja yang lebih transparan serta penguatan pengendalian internal. Bagi auditor eksternal maupun internal, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi risiko kecurangan berdasarkan ukuran dan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, bagi regulator dan investor, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya memperhatikan aspek tekanan keuangan dan skala perusahaan dalam menilai keandalan laporan keuangan sektor infrastruktur.

